

**PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN KAYU JATI PADA
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU JATI
(STUDI KASUS PADA PT. PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**

kk

A 254 / 02

puj

p



MIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DIAJUKAN OLEH

**LILIK PUJIWATI
No. Pokok : 049812053-E**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

SKRIPSI

**M I I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

**PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN KAYU JATI PADA
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU JATI
(STUDI KASUS PADA PT. PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR)**

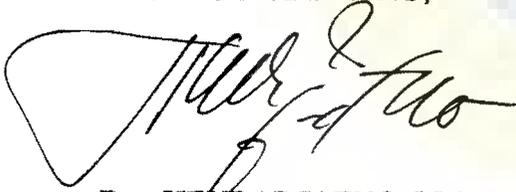
DIAJUKAN OLEH :

LILIK PUJIWATI

No. Pokok : 049812053-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. HENDARJATNO, Msi, Ak
NIP. 131. 801. 637

TANGGAL.....05-11-2002.....

KETUA PROGRAM STUDI,



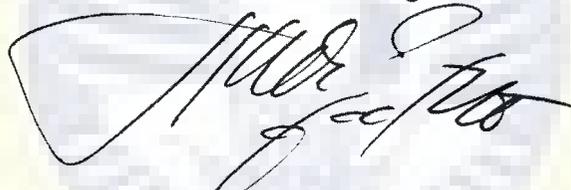
Drs. MOH. SUYUNUS, MAFIS., Ak
NIP. 131. 287. 542

TANGGAL.....7-11-2002.....

Surabaya, 25-09-2002

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Drs. HENDARJATNO, Msi. Ak

NIP. 131. 801. 637

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian tentang Penerapan Pengendalian Intern Atas Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Kayu Jati yang digunakan sebagai bahan baku pada unit Pengolahan Kayu Jati KIPKJ (Kesatuan Industri Pengolahan Kayu Jati yaitu :

1. Penerapan Pengendalian Intern Atas Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Kayu Jati dimulai dari perencanaan kebutuhan biji jati untuk pembibitan dan penanaman sampai penebangan dan pengiriman kayu jati ke KIPKJ.
2. Biro Perencanaan membuat rencana jangka panjang sesuai dengan daur ekonomis kayu jati yaitu RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) maupun rencana jangka pendek yaitu RTT (Rencana Teknik Tahunan).
3. Kebutuhan benih atau biji jati yang diperlukan KPH diperoleh dari Area Produksi Benih, yang merupakan salah satu divisi dari PT. Perhutani yang berfungsi untuk menghasilkan benih yang dibutuhkan perusahaan.
4. KPH sebagai pelaksana persemaian, penanaman, penebangan dan pengiriman kayu jati ke KIPKJ.
5. Biro-biro Unit II Jawa Timur yang terkait dalam pengendalian serta pengawasan adalah Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan, Biro Perlindungan Sumber Daya

Hutan, Biro Produksi, Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan dan Biro Pengawasan

6. Biro Keuangan (Bagian Sistem Informasi Manajemen) menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data dari KPH dan KIPKJ, mengolah dan menganalisa dan menyajikan data yang dibutuhkan manajemen
7. Bagian Sistem Informasi Manajemen menerima laporan DKP (Data Kemajuan Pekerjaan) dari KPH dan laporan hasil kerja dari Bagian TPK KIPKJ
8. Bagian TPK-KIPKJ membuat laporan-laporan yang ditujukan kepada Biro Keuangan (bagian SIM). Laporan tersebut dibuat dua rangkap yang ditujukan kepada :
 - 1) Biro Keuangan yang ditujukan kepada seksi Sistem Informasi Manajemen
 - 2) arsip bagian TPK-KIPKJ
9. Bagian TPK-KIPKJ juga membuat laporan kepada Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Unit II Jawa Timur. Laporan tersebut dibuat dua rangkap, yang ditujukan kepada :
 - 1) Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan dan
 - 2) arsip bagian TPK-KIPKJ
10. Output yang dihasilkan oleh bagian SIM ditujukan untuk Intern Perusahaan dan Ektern Perusahaan misalnya : Depatemaen Kehutanan, Dinas Kehutanan Jawa Timur, Biro Pusat Statistik (BPS) Jatim, Pemerintah Propinsi dan Daerah Tingkat II di Jawa Timur serta Pemegang Saham.

4.2 Saran

Perusahaan sebaiknya mempertahankan sistem yang telah terlaksana dengan baik dan segera memperbaiki dan melakukan penyempurnaan atas kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Pada saat penyediaan biji/ benih jati

Pada saat penyediaan biji/ benih jati agar lebih diefektifkan lagi, untuk mengurangi penyusutan yang terjadi yaitu $\pm 68,4\%$ perkilo pada saat persemaian dan penanaman disebabkan benih jati mudah terserang hama/ penyakit, tidak tahan akan perubahan cuaca sehingga tidak tumbuh baik atau mati , tumbuh lebih lambat dan mempunyai tegakan jelek/ tidak lurus.

Karena kebutuhan benih atau biji jati diperoleh dari Area Produksi Benih yang merupakan salah satu divisi dari PT. Perhutani yang berfungsi untuk menghasilkan benih yang dibutuhkan perusahaan. Maka Area Produksi Benih dapat bekerja sama dengan tenaga Peneliti Pusbanghut (Pusat Pengembangan Hutan) dan Bidang Bioteknologi PT. Perhutani Pusat untuk menciptakan atau mengembangkan benih jati yang tahan penyakit, tahan akan perubahan cuaca, tumbuh lebih cepat dan mempunyai tegakan bagus.

2. Pelaporan KIPKJ khususnya Bagian TPK-KIPKJ kepada Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Unit II Jawa Timur.

Dalam Membuat laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dan pengeluaran kayu jati kepada Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan disarankan rangkap 3 (tiga) yaitu ditujukan kepada :

- 1) Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
- 2) Kepala KIPKJ
- 3) Arsip bagian TPK-KIPKJ

Karena Kepala KIPKJ harus mengetahui laporan tersebut, sehingga Kepala KIPKJ dapat mengevaluasi dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran kayu jati ke PGM dan Bagian Pabrik, dari laporan tersebut Kepala KIPKJ dapat memperkirakan kemajuan dan hambatan produksi di KIPKJ dikarenakan kekurangan persediaan yang mempengaruhi proses produksi atau biaya yang akan timbul disebabkan kelebihan persediaan dan dengan segera mengatasi permasalahan tersebut.

3. Untuk laporan-laporan TPK-KIPKJ yang ditujukan kepada Biro Keuangan khususnya Bagian Sistem Informasi Manajemen Unit II Jawa Timur disarankan rangkap 4 (empat) yaitu ditujukan kepada :
 - 1) Biro Keuangan (Bagian Sistem Informasi Manajemen)
 - 2) Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
 - 3) Kepala KIPKJ
 - 4) Arsip bagian TPK-KIPKJ

Rangkap kedua ditujukan kepada Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan karena KIPKJ merupakan Bidang Pengolahan kayu jati dibawa wewenang Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan. Maka Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan menerima laporan tersebut dari TPK-KIPKJ :Sehingga jika diadakan

Rapat Staf maka Biro Industri dan Pemasaran Hasil Hutan dapat mengadakan sedangkan Laporan dari Bagian SIM adalah laporan gabungan yang bersumber dari DKP (Data Kemajuan Pekerjaan) dari KPH, dan laporan-laporan TPK-KIPKJ.

Rangkap ketiga ditujukan kepada Kepala KIPKJ. Kepala KIPKJ harus mengetahui laporan tersebut, sehingga Kepala KIPKJ dapat mengevaluasi dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran kayu jati ke PGM dan Bagian Pabrik, dari laporan tersebut Kepala KIPKJ dapat memperkirakan kemajuan dan hambatan produksi di KIPKJ dikarenakan kekurangan persediaan yang mempengaruhi proses produksi atau biaya yang akan timbul disebabkan kelebihan persediaan dan dengan segera mengatasi permasalahan tersebut.